



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Juni 2025

Halaman: 1



**MINTA DIUNDUR:** Sejumlah warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Koti Jogja yang terdampak rencana revitalisasi Stasiun Lempuyangan berada di depan Kantor PT KAI Daop 6 Jogja seusai mengikuti audiensi tertutup dengan PT KAI, kemarin (17/6).

# KAI Daop 6 Buka Opsi Penertiban Paksa

Warga Berharap Tempati hingga Agustus agar Bisa Terakhir Rayakan HUT RI

**JOGJA** - Proses penataan Stasiun Lempuyangan masih alot. Sebagian warga Tegal Lempuyangan, Bausasran Danurejan, Kota Jogja, berharap masih bisa menempati bangunan milik PT KAI itu hingga Agustus mendatang. PT KAI Daop 6 Jogja pun

membuka opsi penertiban paksa. Sebagaimana diketahui, PT KAI Daop 6 Jogja telah mengeluarkan surat peringatan agar warga yang masih menempati bangunan rumah dinas PT KAI segera melakukan pengosongan ■ *Baca KAI... Hal 7*

# KAI Daop 6 Buka Opsi Penertiban Paksa

Sambungan dari hal 1

Adapun batas waktu pengosongan maksimal hari Kamis (19/6) mendatang, usai PT KAI mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP3) tertanggal 12 Juni 2025.

Juru bicara warga terdampak Stasiun Lempuyangan Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, sebagai bentuk respons keluarnya SP3 itu beberapa warga terdampak kemudian mendatangi kantor PT KAI Daop 6 Jogja, kemarin (17/6). Dalam pertemuan tertutup itu, warga masih berharap bisa menempati bangunan rumah dinas PT KAI itu hingga Agustus mendatang.

Fokki menyebut, keinginan warga untuk tetap bisa menempati bangunan hingga



**TIDAK MULUK-MULUK:** Juru bicara warga terdampak Stasiun Lempuyangan Antonius Fokki Ardiyanto saat memberikan penjelasan kepada wartawan kemarin (17/6).

Agustus itu karena warga ingin merayakan Hari Kemerdekaan RI untuk kali terakhir. Mereka telah tinggal di lokasi itu selama puluhan tahun.

"Sebenarnya permintaan warga tidak *muluk-muluk*, hanya minta mundur satu bulan saja. *Toh patilah* habisnya masih Oktober," ujar Fokki saat ditemui seusai audiensi kemarin.

Selain itu, kata dia, warga juga berharap kompensasi yang diberikan PT KAI dan uang *bebungh* yang diberikan Keraton Jogja bisa memenuhi kebutuhan warga untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Sebab, nilai kompensasi yang totalnya mencapai Rp. 50 juta dirasa belum cukup.

Fokki menyatakan, nilai

ideal bagi warga seharusnya bisa mencapai Rp. 250 juta. Nilai itu setara dengan biaya kredit perumahan rakyat (KPR). Sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab yang setara dari PT KAI dan Keraton Jogja untuk menyediakan tempat tinggal bagi warga.

"Mengingat itu (memiliki tempat tinggal) adalah hak warga negara," katanya.

Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 6 Jogja Feni Novida Saragih menyampaikan, terkait keinginan warga terdampak untuk menempati bangunan rumah dinas hingga Agustus akan didiskusikan dengan pimpinan di PT KAI pusat. Pun selama ini pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi warga terkait upaya penertiban.

Disinggung kemungkinan ada penertiban paksa, Feni menyebut kebijakan terse-

but bisa saja diambil. Terlebih jika masih ada warga yang masih menempati rumah dinas hingga melewati batas waktu sesuai yang diatur dalam SP3.

Dia mengklaim, dalam upaya penertiban itu PT KAI Daop 6 Jogja juga telah melakukan sesuai prosedur. Termasuk menentukan kompensasi dan ongkos bongkar kepada warga terdampak penataan Stasiun Lempuyangan.

Feni membeberkan, be-

autifikasi Stasiun Lempuyangan dilakukan karena PT KAI Daop 6 Jogja membutuhkan ruang yang lebih luas. Itu seiring semakin banyaknya penumpang kereta yang menggunakan Stasiun Lempuyangan sebagai tempat berangkat maupun pulang untuk perjalanan dengan kereta api.

"Setelah SP3 habis tenggat waktunya, kami akan melakukan penertiban sesuai prosedur," terang Feni.

(inu/laz/zi)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 14 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005